

E.2.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar
Rp.10.538.052.406,71.

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Penjelasan Umum

Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir.

E.2. Catatan Penting Lainnya

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2019 sebagai berikut:

E.2.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp.10.817.599.467,68 dan ekuitas akhir per 31 Desember 2018 Rp.5.678.634.834,90.

E.2.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.-34.744.513.742,28 yang merupakan selisih antara pendapatan dengan beban sehingga menghasilkan defisit dan akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semester I TA 2019.

E.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang disajikan terdiri atas:

- **Koreksi Ekuitas Lainnya**

Jumlah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.-620.891.116,67 merupakan alih status 1 (satu) kendaraan bermotor penumpang.

E.2.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.34.731.394.731,98.

Tabel 18. LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2019 DAN 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	1,096,696,337.72	8,008,736,518.00	(6,912,040,180.28)	(86.31)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1,096,696,337.72	8,008,736,518.00	(6,912,040,180.28)	(86.31)
Pendapatan Hibah - LO	1,096,696,337.72	8,008,736,518.00	(6,912,040,180.28)	(86.31)
Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
BEBAN	35,823,010,080.00	30,352,080,369.00	5,470,929,711.00	18.02
Beban Pegawai - LO	25,489,866,808.00	21,159,405,995.00	4,330,460,813.00	20.47
Beban Persediaan	2,107,704,847.00	1,423,070,850.00	684,633,997.00	48.11
Beban Jasa	3,306,635,258.00	1,825,762,642.00	1,480,872,616.00	81.11
Beban Pemeliharaan	347,142,459.00	755,506,870.00	(408,364,411.00)	(54.05)
Beban Perjalanan Dinas	2,891,092,467.00	2,853,894,842.00	37,197,625.00	1.30
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,680,568,241.00	2,334,439,170.00	(653,870,929.00)	(28.01)
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainny	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	34,726,313,742.28	(22,343,343,851.00)	(12,382,969,891.28)	(104.33)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	34,726,313,742.28	(22,343,343,851.00)	(12,382,969,891.28)	55.42
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	34,726,313,742.28	(22,343,343,851.00)	(12,382,969,891.28)	55.42

Tabel 16. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional per 31 Desember 2019 dan 2018

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

5.2.3 Pos luar biasa

Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada penambahan ataupun pengurangan ekuitas dari pos luar biasa baik yang bersumber dari koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap atau sumber-sumber lainnya. Sehingga jumlah surplus defisit LO terdapat sebesar 0,00 %.

Tabel 17. Perbandingan Pos Surplus/Defisit LO per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(34,744,513,742.28)	(22,343,343,851.00)	55.50
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-
JUMLAH	(34,744,513,742.28)	(22,343,343,851.00)	55.50

D.3. Catatan Penting Lainnya

Laporan Operasional menggambarkan posisi pendapatan dan beban, dimana pendapatan terdiri pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO yaitu Pendapatan Hibah –LO sebesar Rp.1.096.696.337,72 dan Beban sebesar Rp.35.823.010.080,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 25.489.866.808,00 Beban Persediaan sebesar Rp.2.107.704.847,00 Beban Jasa sebesar Rp.3.306.635.258,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp.347.142.459,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.2.891.092.467,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.1.680.568.241,00.

3. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.680.568.241,00 dan Rp. 2.334.439.170,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 beban penyusutan mengalami penurunan sebesar 28,01%.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
Uraian	2019	2018	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,680,568,241.00	2,334,439,170.00	(28.01)
Jumlah	1,680,568,241.00	2,334,439,170.00	(28.01)

5.2.1 Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. -34.744.513.742,28. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
Uraian	2019	2018	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(34,744,513,742.28)	(22,343,343,851.00)	55.50
Jumlah	(34,744,513,742.28)	(22,343,343,851.00)	55.50

5.2.2 Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah Nihil.

Tabel 13. Perbandingan Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas,
per 31 Desember 2019 dan Desember 2018

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Beban	2019	2018	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban Jasa	3,306,635,258.00	1,825,762,642.00	1,480,872,616.00	81.11
2	Beban Pemeliharaan	347,142,459.00	755,506,870.00	(408,364,411.00)	(54.05)
3	Beban Perjalanan Dinas	2,891,092,467.00	2,853,894,842.00	37,197,625.00	1.30
	Jumlah	6,544,870,184.00	5,435,164,354.00	1,109,705,830.00	28.36

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas bahan dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 13a. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JENIS ANGGARAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
Beban Jasa Kantor	69,102,678.00	365,338,263.00	(81.09)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187,400,000.00	213,550,000.00	(12.25)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	3,750,000.00	68,050,000.00	(94.49)
Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	169,180,000.00	(100.00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	233,800,000.00	381,200,000.00	(38.67)
Beban Honorarium PNS	-	556,301,000.00	(100.00)
Beban Honorarium Non PNS	2,450,000.00	223,547,500.00	(98.90)
Beban Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	13,500,000.00	260,800,000.00	(94.82)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	27,356,000.00	104,200,900.00	(73.75)
Beban Pemeliharaan	16,338,311.00	31,038,816.00	(47.36)
Beban Perjalanan Dinas	607,160,068.00	1,430,601,548.00	(57.56)
Jumlah	1,160,857,057.00	3,803,808,027.00	(69.48)

1. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.107.704.847,00 dan Rp. 1.423.070.850,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan Desember 2018
DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Jenis Beban Persediaan	2019	2018	Kenaikan/ penurunan	%
1	Beban persediaan	2,107,704,847.00	1,423,070,850.00	684,633,997.00	48.11
	Jumlah	2,107,704,847.00	1,423,070,850.00	684,633,997.00	48.11

Jika dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2018, maka beban persediaan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 48,11 %. Belanja persediaan Dinas Kehutanan Prov. Babel sudah dicatat di aplikasi persediaan.

2. Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa dikelompokkan menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 beban Jasa sebesar Rp.1.356.739.0384,00 dan Rp.5.435.164.354,00,. Untuk melihat rincian perbandingan jumlah beban dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Laporan operasional pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 30 Juni 2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LO terdiri dari pendapatan Hibah – LO adalah sebesar Rp.1.096.696.337,72,00 dan Sebesar Rp. 8.008.736.518 mengalami penambahan mencapai 86,31 %.

2. Beban

2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25.489.866.808,00 dan Rp.21.159.405.995,00.

Beban Pegawai merupakan beban untuk mencatat gaji dan tunjangan.

Rincian Beban pegawai TA 2019 dan TA 2018 adalah sebagai berikut:

DINAS KEHUTANAN					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
No.	Jenis Beban Pegawai	2019	2018	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	25,489,866,808.00	21,159,405,995.00	4,330,460,813.00	20.47
	Jumlah	25,489,866,808.00	21,159,405,995.00	4,330,460,813.00	20.47

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka beban pegawai pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,47 %.

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Ikhtisar Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan

ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Tabel 10. NERACA
Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Piutang Lainnya	-	
Persediaan	98,018,000.00	5,557,500.00
JUMLAH ASET LANCAR	98,018,000.00	5,557,500.00
ASET TETAP		
Tanah	181,588,442.00	181,588,442.00
Peralatan dan Mesin	13,825,600,661.95	12,822,214,940.90
Gedung dan Bangunan	7,992,808,076.80	6,916,736,864.82
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	95,003,783.96	95,003,783.96
Aset Tetap Lainnya	97,069,440.00	97,069,440.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23,840,000.00	23,840,000.00
Akumulasi Penyusutan	(10,628,416,232.00)	(9,298,111,057.00)
JUMLAH ASET TETAP	11,587,494,172.71	10,838,342,414.68
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	774,011,234.00	774,011,234.00
JUMLAH ASET LAINNYA	774,011,234.00	774,011,234.00
JUMLAH ASET	12,459,523,406.71	11,617,911,148.68
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	-	800,311,681.00
Utang Jangka Pendek lainnya	1,911,711,000.00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,911,711,000.00	800,311,681.00
JUMLAH KEWAJIBAN	1,911,711,000.00	800,311,681.00
EKUITAS		
EKUITAS	10,538,052,406.71	10,817,599,467.68

G. Barang Milik Daerah Non Neraca

Saldo Barang Milik Daerah Ekstrakomptable sebesar Rp. 163.385.000,00.

C.2.2 KEWAJIBAN

Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember Tahun 2018 memiliki Kewajiban jangka pendek.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek meliputi utang jangka pendek lainnya sebesar Nihil per 31 Desember 2019 dan Utang beban, yaitu utang beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November sebesar Rp.951.145.000,00 dan Desember 2019 sebesar Rp. 960.566.000,00 dan utang beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bulan November dan Desember 2018 sebesar Rp. 1.911.711.000,00 yang akan dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2020.

C.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 10.538.052.406,71.

C.3. Catatan Penting Lainnya

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode semester II Tahun 2019 atau periode 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.459.523.406,71. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 98.018.000,00 dengan rincian: Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 00,00, Piutang Lainnya berupa Panjar sebesar Rp. 0,00 Persediaan sebesar Rp. 98.018.000,00, terdiri dari Rp.5.518.000 dan Rp.92.500.000,00 hibah dari BPHP .

Nilai Kewajiban terdiri utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 1.911.711.000,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. Rp. 10.538.052.406,71. Saldo

Tabel 8. Rincian Akumulasi Penyusutan Semester II TA 2019

DINAS KEHUTANAN			
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
URAIAN	Saldo Awal 2018	Penyusutan	Saldo 31 Desember
Akumulasi Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00		0.00
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0.00		0.00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	375,825,380.00	27,317,143.00	403,142,523.00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	235,741,339.00	15,337,815.00	251,079,154.00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	84,734,833.00	21,042,750.00	105,777,583.00
Akumulasi Penyusutan Komputer	332,391,605.00	70,009,305.00	402,400,910.00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	171,057,500.00	3,802,664.00	174,860,164.00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	31,029,167.00	10,771,728.00	41,800,895.00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	3,156,667.00	0.00	3,156,667.00
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22,342,032.00	30,556,800.00	52,898,832.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	740,781,516.00	32,207,892.00	772,989,408.00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	6,302,083.00	312,500.00	6,614,583.00
	2,003,362,122.00	211,358,597.00	2,214,720,719.00

F. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.774.011.234,00, nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

Tabel 9. Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2019

DINAS KEHUTANAN				
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
Aset	Saldo Awal 2018	Reklasifikasi	Akum Penyusutan	Jumlah
ASET LAINNYA				
Aset Lainnya	774,011,234.00	-	-	774,011,234.00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun anggaran 2019 saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.95.003.783.96,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

C. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.97.069.440,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

D. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.23.840.000,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018

E. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. - 9.735.152.827,00. Adapun saldo awal tahun 2018 sebesar Rp. - 9.298.111.057,00.

Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional OPD. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG				
Aset Tetap	Tahun 2018	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	Total
Tanah	181,588,442.00	181,588,442.00	0.00	181,588,442.00
Peralatan dan Mesin	12,822,214,940.90	138,389,577.19	414,856,522.81	12,545,747,995.28
Gedung & Bangunan	6,916,736,864.82	1,076,071,211.98	0.00	7,992,808,076.80
Jalan, Irigasi & Jaringan	95,003,783.96	0.00	0.00	95,003,783.96
Aset Tetap Lainnya	97,069,440.00	0.00	0.00	97,069,440.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	23,840,000.00	0.00	0.00	23,840,000.00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap	(9,298,111,057.00)	892,483,695.00	0.00	(8,405,627,362.00)
Jumlah Aset Tetap	10,838,342,414.68	2,288,532,926.17	414,856,522.81	12,530,430,376.04

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Tanah per 30 Juni 2019 sebesar Rp.181.588.442,00 nilai tersebut sama dengan saldo tahun 2018.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.12.407.358.418,09

Peralatan dan Mesin terdapat mutasi berkurang dari alih status penggunaan alat-alat angkutan.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.992.808.076,80, nilai tersebut bertambah dari saldo tahun 2018.

2. Piutang

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki piutang sebesar Rp. 0,00 berupa panjar kegiatan.

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di organisasi perangkat daerah.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Saldo persediaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 23.568.000,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan Bahan pakai habis dan bahan material dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Persediaan dan Mutasi Semester II TA 2019
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Uraian	Terima	Keluar	Saldo Akhir
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	9,445,000	9,016,500	1,455,500
2	Persediaan peralatan kebersihan dan Bahan	1,293,000	135,000	1,158,000
3	Persediaan pengisian ulang galon	928,000	928,000	-
4	Persediaan meterai	2,820,000	2,370,000	750,000
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak	-	-	-
6	Persediaan alat listrik dan elektronik	8,283,000	6,328,500	2,154,500
7	Persediaan Gas	640,000	640,000	-
8	Cetak	3,265,000	3,265,000	-
9	Persediaan Bahan Bangunan dan Bahan K	6,160,000	6,160,000	-
10	Persediaan Bibit dan Pupuk	253,700,000	253,700,000	-
11	Belanja yang Diserahkan Ke masyarakat	68,620,825	515,685,191	-
12	Hibah dari BPHP	92,500,000	74,450,000	18,050,000
	Saldo			23,568,000

B. Aset Tetap

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai

BAB III

PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:

- 1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung periode semester I Tahun 2019 atau periode 30 Juni 2019 sebagai berikut:

C.2.1 Aset

A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran Periode tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00

29	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan)	193.670.000,00	167.489.379,00	86,48%
30	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan)	122.745.000,00	111.030.000,00	90,46%
31	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antan (DBH-DR Kehutanan)	237.245.000,00	214.391.100,00	90,37%
32	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan)	430.195.000,00	397.445.664,00	92,39%
33	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR Kehutanan)	415.275.000,00	385.060.443,00	92,72%
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	389.471.350,00	174.940.588,00	44,92%
34	Penyelesaian Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan/TORA	9.535.000,00	-	0%

	Promosi Hasil Hutan			
12	Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	200.000.000,00	165.182.500,00	82,59%
13	Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	212.315.000,00	211.046.500,00	99,40%
14	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	987.684.000,00	946.163.565,98	95,80%
	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.635.120.000,00	1.561.922.633,00	95,48%
15	Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan	23.560.000,00	2.080.000,00	0%
16	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	212.932.000,00	152.337.000,00	71,54%
17	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	307.160.000,00	2.000.000,00	0,65%
18	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	186.740.000,00	181.486.600,00	97,19%
19	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	500.980.000,00	492.883.600,00	28,75%
	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)	429.893.000,00	403.431.660,00	
20	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	30.755.000,00	23.555.000,00	27,77%
	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	5.575.534.750,00	3.211.922.633,00	57,61%
21	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	68.644.000,00	49.711.500,00	72,42%
20	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	2.555.000,00	2.330.000,00	91,19%
21	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	82.830.000,00	61.104.400,00	73,77%
22	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	158.492.000,00	135.878.700,00	85,73%
23	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	415.906.000,00	341.433.500,00	82,09%
24	Pengembangan Perhutanan Sosial	422.562.000,00	248.978.291,00	58,92%
25	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	2.225.000.000,00	497.478.631,00	22,36%
26	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR Kehutanan)	103.355.000,00	92.703.500,00	89,69%
27	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kowaringin (DBH-DR Kehutanan)	55.895.000,00	--	
28	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan)	342.000.000,00	278.976.775,00	81,57%

B.3. Catatan Penting lainnya

Realisasi pencapaian target keuangan untuk Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp34.7311.394.731,98 (*empatbelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribusembilan ratus tiga puluhsembilan rupiah*) atau mencapai 90,82% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp38.240.393.873,00,- (*tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga juta enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah*). Pencapaian kinerja keuanganDinas KehutananProvinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun Anggaran 2019 tercantum pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel5.Pencapaian Kinerja KeuanganSemester I TA 2019

NO	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	% Realisasi
		38.240.293.873	34.731.394.731,98	90,82%
	Belanja Tidak Langsung	23.873.111.973,00	23.544.667.489,00	98,62%
	Belanja Langsung	14.347.281.900,00	11.186.727.242,00	17,69%
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.076.892.054,00	4.464.693.288,00	87,94%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.493.930.000,00	3.398.339.818,00	94,99%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.292.877.500,00	913.862.905,00	70,68%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	167.445.500,00	119.428.515,00	71,32%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3.985.000,00	2.450.000,00	61,48%
5	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	26.953.000,00	23.662.050,00	87,79%
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.195.000,00	6.950.000,00	84,81%
	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	2.079.635.096,00	1.948.857.462,00	93,71%
7	Pemanfaatan Kawasan Hutan	54.889.150,00	44.930.250,00	81,86%
8	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	145.280.000,00	103.995.100,00	71,58%
9	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	100.625.000,00	99.458.600,00	98,84%
10	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	47.312.000,00	46.889.200,00	99,11%
11	Expo Pengembangan dan	335.650.000,00	331.191.746,00	98,67%

Tabel 4. Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JENIS ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Bahan Pakai Habis	1,698,221,946.00	1,575,141,897.00
Belanja Jasa Kantor	445,938,554.00	352,316,352.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	612,340,000.00	343,672,459.00
Belanja Cetak dan Penggandaan	157,756,400.00	128,403,450.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	343,360,000.00	319,298,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40,000,000.00	19,250,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,860,000.00	12,700,000.00
Belanja Makanan dan Minuman	288,425,000.00	244,156,000.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	155,440,000.00	155,244,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	3,256,347,500.00	2,889,542,467.00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,000,000.00	19,000,000.00
Belanja Pemeliharaan	206,000,000.00	198,970,046.00
Belanja jasaKonsultasi Perencanaan	50,000,000.00	49,885,000.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,877,345,000.00	1,030,760,906.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	554,900,000.00	503,050,000.00
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	512,510,000.00	392,900,000.00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12,200,000.00	12,200,000.00
Belanja Uang Saku	85,800,000.00	69,175,000.00
Jumlah	11,329,444,400.00	8,315,665,577.00

3. Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi dana untuk belanja modal sebesar Rp. 1.644.637.500,00 terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 674.637.500,00 dan belanja modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 990.000.000,00 terealisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.626.080.500,00 sedangkan Bangunan dan Gedung sebesar Rp.872.901.165,98 atau 90,05%.

Sedangkan realisasi belanja pegawai dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.372.000.000,00 atau 100,00 % Dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.372.000.000,00

**Tabel 3 REALISASI BELANJA HONORARIUM Non PNS SEMESTER 1 TA. 2019
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU ANGGARAN
1	Honorarium	1.372.000.000	1.372.000.000	100%	1.372.000.000
	JUMLAH	1.372.000.000	1.372.000.000	100%	1.372.000.000

2. Belanja Barang dan Jasa

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi dana Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.12.162.444.400,00, dan terealisasi sebesar Rp.9.149.445.577,00 atau 75,23 % dengan perincian sebagai berikut:

B.2.1 Pendapatan LRA

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ditugaskan untuk mengelola pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak maupun retribusi daerah, sehingga tidak terdapat anggaran pendapatan dalam DPA Tahun Anggaran 2019 atau Nihil.

B.2.2 Belanja

Realisasi belanja semester I Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.34.731.394.731,98 atau mencapai 47,11% dari alokasi anggaran sebesar 38.240.393.873,-. Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Alokasi dana/plafon belanja pegawai Tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.23.947.266.298 yang terdiri dari belanja tidak langsung, sebesar Rp.20.762.269.796,95 dan belanja langsung Rp.1.344.200.000. Pada semester II Tahun 2019 Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.13.023.696.323,00 atau 62,80 %, yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan.

**Tabel 2 REALISASI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN SEMESTER 1 TA. 2019
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA PAGU ANGGARAN
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8,342,155,640.00	8,400,958,990.00	100.70	(58,803,350.00)
2	Tunjangan Keluarga	915,159,924.00	862,084,303.00	94.20	53,075,621.00
3	Tunjangan Jabatan	529,340,000.00	476,255,100.00	89.97	53,084,900.00
4	Tunjangan Fungsional	610,260,000.00	597,065,172.00	97.84	13,194,828.00
5	Tunjangan Fungsional Umum	232,330,000.00	172,728,880.00	74.35	59,601,120.00
6	Tunjangan Beras	525,763,452.00	480,289,440.00	91.35	45,474,012.00
7	Tunjangan PPh/Khusus	10,000,000.00	14,414,695.00	144.15	(4,414,695.00)
8	Pembulatan Gaji	1,000,000.00	136,422.00	13.64	863,578.00
9	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	80,000,000.00	69,126,402.00	86.41	10,873,598.00
10	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	243,834,780.95	238,182,910.00	97.68	5,651,870.95
11	Tunjangan Kinerja	-	-		-
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12,337,422,502.00	12,144,853,175.00	98.44	192,569,327.00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	120,000,000.00	88,572,000.00	73.81	31,428,000.00
	JUMLAH	23,947,266,298.95	23,544,667,489.00	98.32	402,598,809.95

- dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 4. Surplus/defisit-LRA
 5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
 6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah pada semester I TA 2019 adalah berupa Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi karena Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan OPD pengelola pendapatan daerah maka realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.34.731.394.731,98 atau mencapai 90,82% dari alokasi anggaran sebesar Rp.38.240.393.873.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara **komparatif**. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas umum daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

2. Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
 - SPM
 - SPD
 - Nota Debit Bank
 - Bukti pengeluaran lainnya
3. Penerimaan Pajak - Bukti Pemotongan Pajak
4. Penyetoran Pajak – I'd Billing

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (Kasda).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan akuntansi pada satuan kerja pemerintah daerah meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD Dinas Kehutanan berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. PPK-SKPD Dinas Kehutanan melakukan pencatatan transaksi belanja pada jurnal umum. Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja pada SKPD Dinas Kehutanan ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU
 - Bukti Pengesahan SPJ
 - SPM
 - SPD
 - Bukti transaksi lainnya

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan Utang kepada pihak ketiga seperti utang pajak diakui setelah bendahara pengeluaran menerbitkan bukti pemotongan dan uang diterima. Persediaan diakui setiap akhir tahun anggaran dan piutang diakui setiap akhir tahun anggaran. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan belanja modal.

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor Seri).
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor Seri);

A.2. Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

APBD Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.
3. Standar Analisa Belanja (SAB)
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

BAB I

PENJELASAN UMUM

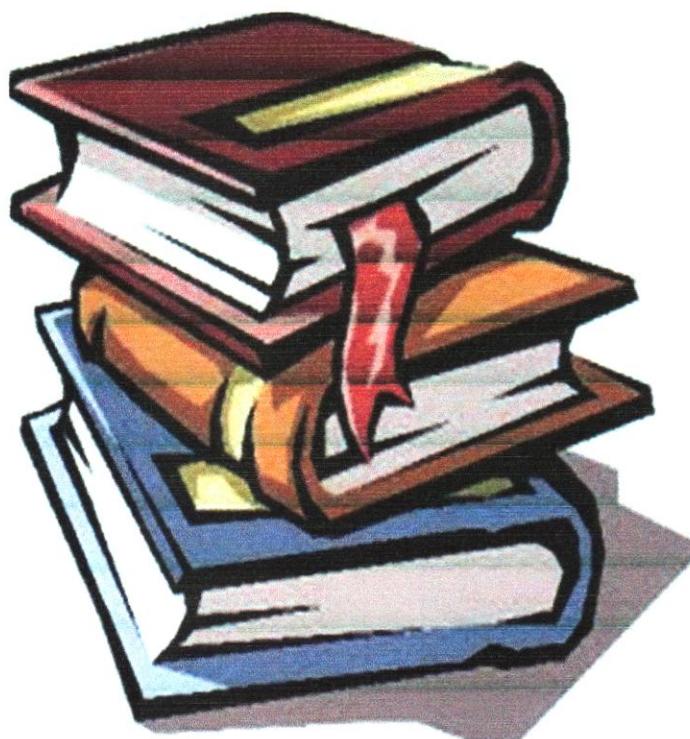
A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 33 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 43 Seri E);

2019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Urusan Pemerintahan : 3 . 04 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN

URAIAN	2019	2018
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	774.011.234,00	774.011.234,00
JUMLAH ASET LAINNYA	774.011.234,00	774.011.234,00
JUMLAH ASET	12.385.073.406,71	11.617.911.148,68
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	1.911.711.000,00	800.311.681,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.911.711.000,00	800.311.681,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.911.711.000,00	800.311.681,00
EKUITAS		
EKUITAS	10.547.812.406,71	10.817.599.467,68
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.459.523.406,71	11.617.911.148,68

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN
 Bidang Pemerintahan : 3.04 KEHUTANAN
 Unit Organisasi : 3.04.01 DINAS KEHUTANAN
 Sub Unit Organisasi : 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
----------	--------	------------	------------	--------------------------	------

					
					
H. Marwan, S.Ag NIP. 19700814 199203 1 002					

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN
 Bidang Pemerintahan : 3.04 KEHUTANAN
 Unit Organisasi : 3.04.01 DINAS KEHUTANAN
 Sub Unit Organisasi : 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(34.809.203.742,28)	(22.343.343.851,00)	(12.465.859.891,28)	55,79
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(34.809.203.742,28)	(22.343.343.851,00)	(12.465.859.891,28)	55,79
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.809.203.742,28)	(22.343.343.851,00)	(12.465.859.891,28)	55,79



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN
Bidang Pemerintahan : 3.04 KEHUTANAN
Unit Organisasi : 3.04.01 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	1.022.246.337,72	8.008.736.518,00	(6.986.490.180,28)	(87,24)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1.022.246.337,72	8.008.736.518,00	(6.986.490.180,28)	(87,24)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	1.022.246.337,72	8.008.736.518,00	(6.986.490.180,28)	(87,24)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	35.813.250.080,00	30.342.330.369,00	5.470.919.711,00	18,03
9.1.1	Beban Pegawai - LO	25.489.866.808,00	21.159.405.995,00	4.330.460.813,00	20,47
9.1.2	Beban Persediaan	2.102.964.847,00	1.423.070.850,00	679.893.997,00	47,78
9.1.2	Beban Jasa	3.306.635.258,00	1.816.012.642,00	1.490.622.616,00	82,08
9.1.2	Beban Pemeliharaan	343.672.459,00	755.506.870,00	(411.834.411,00)	(54,51)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	2.889.542.467,00	2.853.894.842,00	35.647.625,00	1,25
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.680.568.241,00	2.334.439.170,00	(653.870.929,00)	(28,01)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018**

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PILIHAN
 Bidang Pemerintahan : 3.04 KEHUTANAN
 Unit Organisasi : 3.04.01 DINAS KEHUTANAN
 Sub Unit Organisasi : 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	38.240.393.873,00	34.731.394.731,98	90,82	25.506.421.503,00
5.1	BELANJA OPERASI	36.575.756.373,00	33.232.413.066,00	90,86	25.506.421.503,00
5.1.1	Belanja Pegawai	23.873.111.973,00	23.544.667.489,00	98,62	19.326.900.980,00
5.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.702.644.400,00	9.687.745.577,00	76,27	6.179.520.523,00
5.2	BELANJA MODAL	1.664.637.500,00	1.498.981.665,98	90,05	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.637.500,00	626.080.500,00	92,80	0,00
5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	990.000.000,00	872.901.165,98	88,17	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.240.393.873,00)	(34.731.394.731,98)	90,82	(25.506.421.503,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.240.393.873,00)	(34.731.394.731,98)	90,82	(25.506.421.503,00)

Pangkalpinang, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Kehutanan


H. Marwan, S.Ag
 NIP. 19700814 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

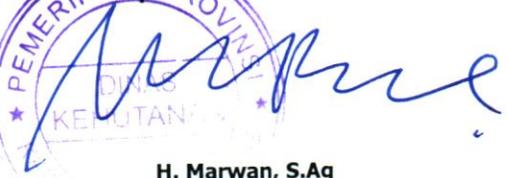
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 04	KEHUTANAN		
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01	DINAS KEHUTANAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 01	DINAS KEHUTANAN		

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	10.817.599.467,68	5.678.634.834,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.809.203.742,28)	(22.343.343.851,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Gar	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permane	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	(1.960.000,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.200.000,00	48.568.074,78
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	350.263.066,00	(157.368.282,00)
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(620.891.116,67)	(641.768.327,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	34.731.394.731,98	28.234.837.018,00
EKUITAS AKHIR	10.473.362.406,71	10.817.599.467,68

Bangkalpinang, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kehutanan



H. Marwan, S.Ag

NIP. 19700814 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEHUTANAN

Jl. Mentok No. 205 Pangkalpinang Telp/ Fax: (0717) 439065

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan pada Akhir Tahun 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. MARWAN, S.Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 197008141992031002



PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2019



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG